



BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
SETDA PROV NUSA TENGGARA TIMUR

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP

## TAHUN 2023





**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari No 52, Telepon (0380) 833114  
Pos-el : biroekonomidanap@gmail.com

**LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2023**  
**BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINSTRASI PEMBANGUNAN**  
**SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No	Reviewer	Catatan/Koreksi
1.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	1. Perbaiki penulisan, font, kerapihan dan konsistensi huruf 2. Verifikasi data capaian dari masing-masing bagian dan perhitungan persentase capaiannya
2.	Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Acc

Kupang, 26 Februari 2024

Plt. Kepala Biro Perekonomian dan  
Administrasi Pembangunan  
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Dik. Alexander B. Koroh, MPM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 197004271990031005

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan penyelenggaraan-Nya, sehingga seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun anggaran 2023 dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, dan sukses.

Berkenaan dengan itu, sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Tahun 2023. Dengan adanya LKIP ini diharapkan dapat diperoleh umpan balik yang bermanfaat bagi optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi biro.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu berbagai kritik dan usul saran dari semua pihak demi optimalnya pelayanan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT dan penyempurnaan laporan ini, kami sampaikan terima kasih.

Kupang, 26 Februari 2024

Plt. Kepala Biro Perekonomian dan  
Administrasi Pembangunan  
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,



*(Handwritten signature)*  
Drs. Alexander B. Koroh, MPM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 197004271990031005

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah, wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PERMENPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP.

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mendapat alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 sebesar **Rp. 1.113.855.120.-** mengalami penambahan anggaran sebesar **Rp. 2.829.160.-** dan Total Anggaran akhir **Rp. 1.116.684.280.-.** dengan realisasi fisik sebesar **77,71 %**.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2023 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) tahun 2023 berisi laporan pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sesuai dengan tupoksi yang diembannya, maka pada tahun 2023 ini Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 3 (tiga) sasaran strategis

dengan indikator kerjanya masing-masing sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2023. Realisasi dari masing-masing indikator dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja : Cakupan kebijakan bidang perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik. Target 4 (empat) rekomendasi, Realisasi 65 Laporan, 8 Rekomendasi,
2. Indikator Kinerja : Cakupan kebijakan pengelolaan SDA yang terkonsolidasi dengan baik. Target 5 (lima) rekomendasi, Realisasi 4 Dokumen
3. Indikator Kinerja : Prosentase BUMD yang memiliki kinerja baik. Target 75 %, Realisasi 75 % dimana pada tahun 2023 ada 3 (Tiga) BUMD yang berkinerja baik. Dan menghasilkan 4 Dokumen
4. Indikator Kinerja : Efektifitas peningkatan kinerja administrasi Pembangunan dengan target 100 % dan 8 laporan pengendalian administrasi pembangunan yang memenuhi standar akuntabilitas realisasi 100% dan menghasilkan 14 laporan

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 terpenuhi sesuai dengan harapan.

Memperhatikan perbandingan capaian kinerja antara target indikator kinerja dan realisasi Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur nampak seluruh indikator yang direncanakan berhasil dicapai dengan optimal sesuai target. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan pembinaan dan komitmen kuat dari Kepala Biro, pejabat Fungsional Ahli Madya dan Pejabat Fungsional Ahli Muda Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan seluruh staf pelaksana dilingkungan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan prinsip efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kupang, 26 Februari 2024

Plt. Kepala Biro Perekonomian dan  
Administrasi Pembangunan  
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,



*(Handwritten signature)*  
Dr. Alexander B. Koroh, MPM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 197004271990031005

# DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB 1 Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Dasar Landasan .....	2
1.4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.....	3
1.5. Analisis Lingkungan Stratejik.....	4
1.6. Sistematika Penyajian LKIP .....	8
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kerja .....	10
2.1. Perencanaan Kinerja .....	10
2.2. Program dan Kegiatan .....	10
2.3. Perjanjian Kinerja (PK) .....	11
2.4. Anggaran Belanja Biro Perekonomian dan Admnistrasi Pembangunan .....	19
BAB III Akuntabilitas Kinerja .....	22
3.1. Pengukuran Kinerja .....	22
3.2. Capaian Kinerja Organisasi .....	24
3.3. Akuntabilitas Keuangan .....	41
BAB IV Penutup .....	52
4.1. Kesimpulan .....	52
4.2. Rekomendasi .....	53

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuannya itu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Perencanaan Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Perencanaan strategik memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis untuk mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Laporan kinerja ini merupakan bagian dari upaya Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan pemenuhan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PERMENPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu LKIP.

Salah satu tuntutan reformasi yang diinginkan oleh seluruh masyarakat adalah reformasi birokrasi melalui penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi, diantaranya dengan cara penyederhanaan prosedur birokrasi, pelayanan satu pintu dan kemudahan perolehan informasi. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi serta menciptakan organisasi yang bersih dan bertanggungjawab, maka untuk lebih memantapkan Kinerja Instansi Pemerintah, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan ini disusun dengan memperhatikan berbagai kondisi dan permasalahan yang

dihadapi baik kondisi internal maupun eksternal. Tersusunnya LKIP Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan:

- (1) Meningkatkan kualitas Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
- (2) Meningkatkan komitmen dan kerjasama antara Inspektorat, Bappelitbangda, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Biro Organisasi Setda Provinsi NTT maupun seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga terjalin kerjasama sesuai manajemen kinerja mulai dari perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja hingga pada evaluasi kinerja; dan
- (3) Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dengan baik, benar dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan Penyusunan LKIP Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut

### **1. Maksud :**

Untuk memberikan informasi yang komprehensif berkaitan dengan pencapaian pelaksanaan Rencana Strategik (Renstra) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar lebih meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang organisasi yang lebih berdayaguna, berhasil guna, transparan dan bertanggungjawab.

### **2. Tujuan :**

Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

## **1.3. Dasar Pelaksanaan**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Laporan Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

#### **1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi NTT Nomor 0102) dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTT, dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk Penyederhanaan Birokrasi Pasal 1 poin 16 dan 17, maka susunan struktur organisasi pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan terdiri atas:

Organisasi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan terdiri dari :

1. Jabatan Struktural :
  - 1.1. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
  - 1.2. Kepala Sub Tata Usaha.
2. Analisis Kebijakan Ahli Madya
3. Analisis Kebijakan Ahli Muda
4. Pranata Komputer Ahli Pertama
5. Pelaksana

Total jabatan struktural dan fungsional yang terisi pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebanyak 6 (Enam), terdiri dari 2 (dua) jabatan struktural dan 3 (Tiga) jabatan fungsional dan 1 (Satu ) Pelaksana sebagai berikut :

- Eselon II : 1 orang
- Eselon IV : 1 orang
- Analis Ahli Madya : 3 orang
- Analis Ahli Muda : 6 orang
- Pranata Komputer Ahli pertama : 4 orang
- Pelaksana : 24 orang

Bagan struktur organisasi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan seperti tersebut di atas merupakan salah satu elemen penting yang memungkinkan beroperasinya seluruh sumber daya aparatur dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

### 1.5 Analisis Lingkungan Strategik

Potensi yang dimiliki Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya meliputi dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana dan dukungan keuangan, sebagai berikut :

#### 1. Dukungan SDM

Jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan ruang, kualifikasi pendidikan, jabatan struktural, fungsional dan pelaksana pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan per Desember 2023 sebagai berikut :

#### **Data PNS Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2023**

##### **- Jumlah Pegawai**

No	Jabatan	Jumlah	Eselon	Ket
1	Kepala Biro	1	II-B	Terisi
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	IV-A	Terisi
3	Analisis Kebijakan Ahli Madya	3	-	Terisi

No	Jabatan	Jumlah	Eselon	Ket
4	AnalisisKebijakan Ahli Muda	6	-	Terisi
5	Pranata Komputer Ahli Pratama	4	-	Terisi
6	Pelaksana	28	-	Terisi
Jumlah		39 orang		

**- Berdasarkan Gender**

- Laki-Laki : 17 orang
- Perempuan : 22 orang

**- Berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1	S3	1 Orang
2	S2	8Orang
3	S1	22Orang
4	SLTA	8 Orang
Jumlah		<b>39 Orang</b>

**- Berdasarkan Golongan**

	Pangkat	Golongan	Jumlah ASN
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1 orang
2	Pembina Tk I	IV/b	3 orang
3	Pembina	IV/a	3 orang
4	Penata Tk 1	III/d	16 orang
5	Penata	III/c	2 orang
6	Penata Muda Tk 1	III/b	2 orang
7	Penata Muda	III/a	7 orang
8	Pengatur Tk I	II/d	1 orang
9	Pengatur	II/c	3 orang
10	Pengatur Muda Tk I	II/b	1 orang
11	Pengatur Muda	II/a	- orang
Jumlah			<b>39 Orang</b>

2. Dukungan sarana dan prasarana kantor

Kondisi dan jenis sarana prasarana juga berpengaruh terhadap operasional kegiatan organisasi, meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan sarana transportasi. Secara umum keadaan sarana dan prasarana pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dapat dilihat pada buku inventarisasi barang yang didalamnya terdapat kartu inventarisasi barang dan rekapitulasi aset tetap.

Secara umum dapat di sampaikan sebagai berikut :

NO	SPESIFIKASI BARANG		SATUAN	TAHUN	KONDISI (B/KB/R/RB)	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
	NAMA/ JENIS BARANG	MEREK/ TYPE						
1	Laptop	Toshiba	Buah	2013	B	1	7.391.000	7.391.000
		Toshiba	Buah	2013	B	2	9.000.000	18.000.000
		Acer	Buah	2013	B	1	4.400.000	4.400.000
			Buah	2018	B	4	9.750.000	39.000.000
			Buah	2019	B	1	7.500.000	7.500.000
		Asus	Buah	2022	B	2	8.855.000	17.710.000
2	Komputer PC	Samsung	Buah	2013	B	1	7.000.000	7.000.000
		Acer	Buah	2013	B	5	4.400.000	22.000.000
			Buah	2014	B	3	6.000.000	18.000.000
			Buah	2014	B	1	8.000.000	8.000.000
			Buah	2015	B	2	7.500.000	15.000.000
			Buah	2015	B	4	8.500.000	34.000.000
			Buah	2017	B	1	7.500.000	7.500.000
		Hp all in one	Buah	2018	B	1	10.000.000	10.000.000
		Asus	Buah	2017	B	2	7.500.000	15.000.000
		Lenovo	Buah	2018	B	1	7.250.000	7.250.000
			Buah	2020	B	6	8.000.000	48.000.000
3	Printer	Canon	Buah	2013	B	2	1.000.000	2.000.000
			Buah	2014	B	4	1.000.000	4.000.000
		Scan Pixma	Buah	2015	B	1	2.500.000	2.500.000
		Dot Matrix	Buah	2015	B	2	8.500.000	17.000.000
		Canon	Buah	2016	B	1	2.500.000	2.500.000
		Scan Pixma	Buah	2016	B	1	2.500.000	2.500.000

NO	SPESIFIKASI BARANG		SATUAN	TAHUN	KONDISI (B/KB/R/RB)	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
	NAMA/JENIS BARANG	MEREK/TYPE						
		Epson L380	Buah	2017	B	1	3.500.000	3.500.000
			Buah	2018	B	4	3.400.000	13.600.000
		Epson L310	Buah	2020	B	6	4.000.000	24.000.000
4	UPS	Ersis	Buah	2013	R	1	880.000	880.000
		ICA	Buah	2018	B	3	1.700.000	5.100.000
5	Notebook	Toshiba	Buah	2013	B	2	3.250.000	6.500.000
6	Infocus	Proyektor NEC	Buah	2013	B	1	5.000.000	5.000.000
		Proyektor Banq	Buah	2014	B	1	8.000.000	8.000.000
		Proyektor Glite	Buah	2016	B	1	2.500.000	2.500.000
		LCD Proyektor Epson EB-S400	Buah	2017	B	1	6.000.000	6.000.000
		TipeSegie mpat	Buah	2018	B	1	850.000	850.000
7	Sound System						25.000.000	25.000.000
8	Filling Kabinet		Buah	2015	B	1	7.500.000	7.500.000
				2018	B	2	2.366.700	4.733.400
9	Kendaraan	Rush DH 936 AW	Unit (KIBOLOG)	2014	B	1	228.685.000	228.685.000
		Rush DH 53 WA	Unit	2015	B	1	250.100.000	250.100.000

### 3. Dukungan Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam Pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 terdapat perubahan anggaran di setiap SKPD. Pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan perubahan anggaran, anggaran awal sebesar **Rp. 1.113.855.120.-** Penambahan Anggaran **Rp. 2. 830.800.-** Total Anggaran akhir **Rp. 1.116.684.280.-.**

## 1.6 Sistematika Penyajian LKIP

Sistematika penyajian LKIP Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan adalah sebagai berikut:

**Bab I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini diuraikan alasan/manfaat disusunnya LKIP, struktur dan tupoksi organisasi sampai pada unit kerja yang terendah, potensi internal dalam ruang lingkup organisasi serta sistematika dari penyusunan LKIP.

**Bab II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA**

Dalam Bab ini diuraikan mengenai visi dan misi organisasi, program/kegiatan yang dilaksanakan, pengungkapan perjanjian kinerja/penetapan kinerja.

**Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam Bab ini dipaparkan mengenai capaian indikator kinerja utama setiap sasaran strategik, evaluasi dan akuntabilitas kinerja setiap sasaran strategis, evaluasi dan akuntabilitas kinerja setiap sasaran strategis serta uraian akuntabilitas anggaran.

**Bab IV : PENUTUP**

Dalam Bab ini berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan LKIP disertai dengan harapan bahwa laporan ini mampu menjadi pedoman perbaikan pelaksanaan tugas Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada masa yang akan datang.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

#### 2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja dan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan tahun 2018 s.d 2023 di dasarkan atas visi dan misi Gubernur Nusa Tenggara Timur yaitu :

1. Visi

NTT Bangkit Menuju Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Misi

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
  2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
  3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
  4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia; dan
  5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Tugas pokok Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yaitu : membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam Penyiapan Perumusan Kebijakan Daerah, Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah serta Administrasi Pembangunan.

#### 2.2. Program dan Kegiatan

Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana tersebut diatas, pada tahun anggaran 2023 telah disusun program dan kegiatan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebagai berikut :

❖ **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- ✓ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- ✓ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- ✓ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- ✓ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

- ✓ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- ❖ **Program Perekonomian dan Pembangunan**
  - ✓ Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian;
  - ✓ Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam ;
  - ✓ Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD.
- ❖ **Program Administrasi Pembangunan:**
  - ✓ Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah
  - ✓ Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

### 2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan Sumber Daya yang dikelola.

Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur ;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah ;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi ;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ; dan
5. Sebagai dasar pemberi reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Tahun 2023 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 yang telah ditetapkan berdasarkan RPJMD 2018 s.d 2023 yang menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu :

1. Terlaksananya koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah dibidang perekonomian dan Sumber Daya Alam.
2. Terlaksananya koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik.
3. Terwujudnya tata kelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah dan Wilayah di Provinsi atau Kab/Kota.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

**A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	Terlaksananya koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah dibidang perekonomian dan Sumber Daya Alam	Perlaksanaan Kebijakan Perekonomian Makro dan Mikro	5 Rekomendasi	4 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi
		Perlaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	3 Rekomendasi	5 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi
	Terlaksananya koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	Persentasi Jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik	50%	75%	$\frac{\text{Jumlah BUMD yang berkinerja baik}}{\text{Jumlah BUMD di Provinsi NTT}} \times 100$
		Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Rekomendasi	2 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi
	Terwujudnya tatakelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah dan Wilayah di Provinsi atau Kab/Kota se-NTT	Efektivitas peningkatan kinerja Administrasi Pembangunan	100%	100%	$\frac{\text{Jumlah Bagian yang menjadi Administrasi}}{\text{Jumlah Sub Bagian yang menjadi Administrasi}} \times 100$
		Laporan Pengendalian Administrasi Pembangunan yang memenuhi standar akuntabilitas	10 Laporan	8 Laporan	Jumlah Laporan

## B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Keterangan
1.	<b>APBD</b>		
	<b>a) Belanja(Program)</b>	<b>Rp. 1.116.684.280,-</b>	<b>Realisasi minimal 85%</b>
	1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 441.685.840,-	Realisasi minimal 90%
	2. Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 574.998.700,-	Realisasi minimal 85%
	3. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp. 99.999.740,-	Realisasi minimal 85%
	<b>b) Pendapatan</b>	<b>Rp. -</b>	
2.	<b>Jumlah Belanja + Pendapatan ( APBD )</b>	<b>Rp 1.116.684.280,-</b>	<b>Realisasi minimal 90 %</b>
	<b>APBN</b>		
	<b>a) Program Dekonsentrasi</b>	<b>Rp -</b>	<b>-</b>
	1.	Rp. -	-
	<b>b) Program Tugas Pembantuan</b>	<b>Rp.-</b>	<b>-</b>
	1.	Rp.-	-
	<b>Jumlah Dekonsentrasi+Tugas Pembantuan</b>	<b>Rp.-</b>	<b>-</b>

2. Belanja menggunakan aplikasi E-Purchasing minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;
3. Penyampaian LKPD, LPPD/LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 4 Februari 2023;
4. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal Kategori BB (>70-80);
5. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90%;
6. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP:
  - 1) TL temuan di bawah tahun 2022; Administrasi 100%, Keuangan 80%
  - 2) TL temuan di atas tahun 2022; Administrasi 100%, Keuangan 80%
7. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 2 (dua) Jenis;
8. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023;
9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);
10. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (76,99);

11. Jumlah Kerja sama dengan Lembaga Mitra/ NGO/ LSM/ Pihak Lain yang mendukung pencapaian target IKU Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja dari setiap sasaran strategis di bagi dalam 2 (dua) Program yang dijelaskan sebagai berikut :

**1. Capaian dari Program Perekonomian dan Pembangunan adalah:** Cakupan implementasi kebijakan bidang perekonomian, Sumber Daya Alam dan BUMD/BLUD.

Program ini melaksanakan 3 (tiga) kegiatan, untuk Keluaran, Hasil dan Indikator Kinerja dari masing-masing kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Adapun 3 (tiga) kegiatan yang di laksanakan dalam program Perekonomian dan Pembangunan yaitu

**a. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**

<b>Keluaran</b>	:	Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi Perekonomian Makro dan Mikro	
<b>Hasil</b>	:	Terlaksanannya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Daerah Secara Optimal.	
<b>Indikator/ Target</b>	:	1. Jumlah Dokumen hasil pemantauan dan pengendalian inflasi daerah (TPID) .	62 Dok 7 Rek
	:	2. Jumlah Dokumen dan hasil koordinasi dan sosialisasi kebijakan pengembangan UMKM dan optimalisasi penyaluran KUR	1 Dok 1 Rek
	:	3. Jumlah Dokumen Hasil, evaluasi dalam rangka pengendalian BBM bersubsidi di NTT	2 Dok

**b. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**

<b>Keluaran</b>	:	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	
<b>Hasil</b>	:	Terlaksanannya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	
<b>Indikator / Target</b>	:	1. Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi penyusunan Kebijakan Terkait pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu ( HHBK) lok. Kota kupang dan Kab. TTS	1 Dok
	:	2. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Madu di Kec. Mutis	1 Dok
	:	3. Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan SDA ( lok. Kab. Kupang, Sumba Barat Daya 1x, KabTTS, Kab. TTU	1 Dok
	:	4. Jumlah Dokumen Hasil	1 Dok

		Monitoring dan Evaluasi Potensi Pengembangan EBT dan Sumber Daya Alam Lokasi Kab .Kupang, Kab. Sumba Tengah, Kab Sumba Timur	
--	--	--	--

**c. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**

<b>Keluaran</b>	:	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	
<b>Hasil</b>	:	Terlaksanannya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	
<b>Indikator / Target</b>	:	1. Jumlah Dokumen Hasil Rapat Evaluasi Kinerja dan Pembinaan BUMD Provinsi (3x Rapat Evaluasi Pembinaan BUMD Provinsi Menghasilkan 1 Dok	1 Dok
		2. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Lok Kab Ende, Kab Alor, Kab.Kupang Kab.TTS, Kab.TTU	1 Dok
		3. Jumlah Dokumen Hasil pemantauan dan Pembinaan BUMD Provinsi NTT ( PT. BPD NTT, PT. Jamkrida, PT.Flobamor, dan PT. Kawasan Industri Bolok )	1 Dok
		4. Jumlah SK Hasil Rapat Sosialisasi SK Gubernur Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum	SK Gubernur
		5. Jumlah Dokumen Hasil Rapat Sosialisasi SK Gubernur Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penerapan SK Gubernur Tentang Tarif Batas Atas Bawah Air Minum Perumda /PDAM di Kab/Ko Se- Provinsi NTT Lokasi Manggarai Barat, Kab. Ende, Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Belu, Kab. Alor Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum	1 Dok
		6. Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi kebijakan Pengelolaan BLUD (Lokasi, Kab. Kupang Tanggal 23 Mei 2023)	1 Dok
		7. Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Hasil Monev dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Kementerian dalam Negeri RI Terkait kebijakan Pengelolaan BLUD di Prov. NTT tanggal 7 s/d 9 Februari 2023	1 Dok
		8. Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi kebijakan Pendirian BLUD	1 Dok
		9. Jumlah Dokumen Hasil Monev dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Kementerian dalam Negeri RI Terkait kebijakan Pendirian BLUD di Prov. NTT tanggal 3 s/d 6 Desember 2023	1 Dok

## 2. Program Administrasi Pembangunan

**Capaian dari Program ini yaitu:** Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan

Program ini melaksanakan 1 (satu) kegiatan, untuk Keluaran, Hasil dan Indikator kinerja dari kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Adapun 1 (satu) kegiatan yang di laksanakan dalam program Administrasi Pembangunan yaitu :

### a. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

<b>Keluaran</b>	:	Terlaksananya program Administrasi Pembangunan	
<b>Hasil</b>	:	Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	
<b>Indikator / Target</b>	:	1. Jumlah Dokumen Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (APBD ) Rapat dilaksanakan 2x dalam setahun dengan Lokasi , Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Nagakeo,Kab. Sikka,Kab. TTS, Kab. TTU	2 Dok
	:	2. Jumlah Dokumen Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ( APBN ) Rapat dilaksanakan 2x dalam setahun dengan Lokasi , Kota Kupang	2 Dok
	:	3. Jumlah Laporan Paket Sebaran Kegiatan APBD	1 Dok
	:	4. Jumlah Dokumen Hasil monitoring dan pemantauan pelaksanaan Pembangunan daerah di Kab/Kota lokasi, Kota kupang, Kab. Kupang, Kab. Nagakeo,Kab. Sikka,Kab. TTS, Kab. TTU	1 Dok
	:	5. Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi pengendalian administrasi pelaksanaan Pembangunan wilayah yang dilaksanakan 2x dalam setahun dengan lokasi, Kota kupang dan Kab. TTS.	1 Dok
	:	6. Jumlah Dokumen Hasil pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan pelaporan pelaksanaan Pembangunan daerah	13 Dok
	:	7. Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dan Wilayah	1 Dok

Mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja (PK) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan maka kegiatan untuk mendukung sasaran strategis secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>Kegiatan 1</b>	<b>:</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</b>
		Untuk mewujudkan pencapaian kegiatan tersebut maka dijabarkan dalam sub kegiatan :
		1. Fasiltasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 2. Fasiltasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
		Besar anggaranyang untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar <b>Rp. 324.999.900,-</b>
<b>Kegiatan 2</b>	<b>:</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</b>
		Untuk mewujudkan pencapaian kegiatan tersebut maka dijabarkan dalam sub kegiatan :
		1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan. 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.
		Besar anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar <b>Rp. 74.999.720 ,-</b>
<b>Kegiatan 3</b>	<b>:</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</b>
		Untuk mewujudkan pencapaian kegiatan tersebut maka dijabarkan dalam sub kegiatan :
		1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan EvaluasikebijakanPengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha. 2. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan EvaluasiKebijakanPengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi. 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan EvaluasiKebijakandan pengelolaan BLUD 4. Koordinasi, Sinkronisasi dan EvaluasiKebijakandan pendirian BLUD
		Besar anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar <b>Rp.174.999.080,-</b>
<b>Kegiatan 4</b>	<b>:</b>	<b>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>
		Untuk mewujudkan pencapaian kegiatan tersebut maka dijabarkan dalam sub kegiatan :
		1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 2. Pelaporan pelaksanaan Pembangunan Daerah
		Besar anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar <b>Rp. 99.999.740,-</b>

#### **2.4. Anggaran Belanja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan**

Dalam Pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 terdapat perubahan anggaran di setiap SKPD. Pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023 oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT adalah 3 (tiga) Program dengan 10 (sepuluh) kegiatan.

**Komposisi Anggaran Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2023**

No.	Program/ Kegiatan	DPA Murni	Perubahan	
			Penambahan	Jumlah Anggaran
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	438.855.040.-	2.830.800.-	441.685.840.-
2.	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	574.998.700.-	-	574.998.700.-
3.	<b>Program Kebijakan Administrasi Pembangunan</b>	99.999.740	-	99.999.740
	<b>Total</b>	<b>1.113.855.120.-</b>	<b>2.830.800.-</b>	<b>1.116.684.280.-</b>

**Komposisi Anggaran Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2023**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pagu Akhir (Rp.)
1	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	1. Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja PD		47.616.400	-	47.616.400
		2. Administrasi Umum PD		207.090.600	-	207.090.600
		3. Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD		32.278.000	-	32.278.000
		4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD		93.817.240	2.830.800	96.648.040
		5. Pemeliharaan Barang		53.052.800	-	53.052.800

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pagu Akhir (Rp.)
		Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2	<b>PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	1. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	5. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	324.999.900	-	324.999.900
		2. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	53.232.100	-	53.232.100
			7. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	21.767.620	-	21.767.620
		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	8. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	33.819.660	-	33.819.660
			9. Koordinasi, Sinkronisasi,	66.179.620	-	66.179.620

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pagu Akhir (Rp.)
			Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi			
			10. Koordinasi , Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	50.000.000	-	50.000.000
			11. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	24.999.800	-	24.999.800
3	<b>KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	12. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	33.499.840	-	33.499.840
			13. Pengendalian	6.499.900	-	6.499.900

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pagu Akhir (Rp.)
			n Administrasi Pelaksanaan Pembanguna n APBN			
			14.Pengendalia n Administrasi Pelaksanaan Pembanguna n wilayah	30.000.000	-	30.000.000
		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	15.Pelaporan Pelaksanaan Pembanguna n Daerah	30.000.000	-	30.000.000
<b>JUMLAH</b>				<b>1.113.855.120.-</b>	<b>2.830.800.-</b>	<b>1.116.684.280.-</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja yang dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan sebagai fungsi *actuating* sampai pada pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai sistem perencanaan yang telah dibuat. Piranti pengukurannya berupa Pengukuran Kinerja untuk mengukur sasaran.

LKIP Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

#### **3.1 Pengukuran Kinerja**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran melalui

instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, Perekonomian dan Administrasi Pembangunan melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

## 1. Metode Pengukuran Kinerja

### Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja digunakan rumus

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja Tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran

yang diinginkan.

## 2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- $X \geq 85\%$  : Sangat Berhasil
- $75\% \leq X < 85\%$  : Berhasil
- $55\% < X < 75\%$  : Cukup Berhasil
- $X \leq 55\%$  : Belum Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran, maka dapat dijelaskan sasaran strategis Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2023 sebagai berikut :

### 3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Sasaran Strategis Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan tahun 2023 sesuai target keberhasilan yang dapat diuraikan dalam table sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)		KEBERHASILAN
1	2	3		5	6	7	8
1.	Terlaksanannya koordinasi pembinaan ,Monitoring dan Evaluasi Penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian dan SDA	Perlaksanaan Kebijakan Perekonomian Makro dan Mikro	4 Rek	73 Rek	100 %		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya HLM TPID, 4 kali, untuk 30 orang, Lokasi Kota Kupang,</li> <li>- RATEK TPID, 2 kali, untuk 30 Orang Lokasi Kota Kupang</li> <li>- Sidak Pasar, 2 kali, untuk 30 orang Lokasi Kota Kupang</li> <li>- Terlaksananya Rapat Optimalisasi Penyaluran KUR dan UMI, 1 kali, untuk 60 orang, Lokasi Kota Kupang</li> <li>- Forum Grup Diskusi (FGD), 4 kali, untuk 30 org, Lokasi Kota Kupang,</li> <li>- Rapat Evaluasi Pengendalian Distribusi BBM, 1 kali, untuk 60 orang, Lokasi Kota Kupang</li> </ul>

		Perlaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	5 Rek	4 Rek	100		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya pembinaan Sentra Hasil Hutan Bukian Kayu Madu di Kec. Mutis;</li> <li>2. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan SDA ( lokasi Kab. Kupang, Sumba Barat Daya 1x, Kab. TTS, Kab. TTU ;</li> <li>3. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi potensi pengembangan EBT dan SDA (lokasi Kab. Kupang, Sumba Tengah, Sumba Timur).</li> </ol>
2	Terlaksananya koordinasi, pembinaan monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentasi Jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik	75%	75%	75%		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Rapat Evaluasi Kinerja dan Pembinaan BUMD Provinsi (3x Rapat Evaluasi Pembinaan BUMD Provinsi;</li> </ol>

	yang lebih baik	Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Rek	8 Rek	100 %	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Lok Kab Ende, Kab Alor, Kab.Kupang Kab.TTS, Kab.TTU;</li> <li>3. Terlaksananya pemantauan dan Pembinaan BUMD Provinsi NTT ( PT. BPD NTT, PT. Jamkrida, PT.Flobamor, dan PT. Kawasan Industri Bolok );</li> <li>4. Terlaksananya Rapat sosialisasi SK Gubernur Penetapan Tarif Batas Atas dan Bawah Air Minum;</li> <li>5. Terlaksananya monitoring dan evaluasi penetapan SK Gubernur Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Perumda/PDAM di Kab/Kota Se-Provinsi NTT (Lok. Manggarai Barat, Ende, TTS, TTU, Belu, Alor);</li> <li>6. Terlaksananya Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring,dan Evaluasi kebijakan Pengelolaan BLUD (Lokasi, Kab. Kupang Tanggal 23 Mei 2023);</li> <li>7. Monev dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Kementerian dalam</li> </ol>
--	-----------------	---	-------	-------	-------	--

3	Terwujudnya Tatakelola Monitoring dan Pelaporan pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah dan Wilayah di Provinsi atau Kab/Kota se-NTT	Efektivitas peningkatan kinerja Administrasi Pembangunan Daerah	100%	100%	100%		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan (APBD);</li> <li>2. Paket sebaran kegiatan APBD;</li> <li>3. Terlaksananya rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan (APBN);Rapat dilaksanakan 2 x dalam setahun lokasi di kota Kupang dan Kab Kupang</li> <li>4. Terlaksananya monitoring dan pemantauan pelaksanaan pembangunan daerah di Kab/Kota; ( Lokasi Kota Kupang ,Kab. Kupang Kab. Ngada ,kab Sikka, Kab TTs,Kab TTU</li> <li>5. Terlaksananya rapat koordinasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah; yang dilaksanakan 2 Kali dalam setahun dengan Lokasi Kota Kupang, Kab. TTS</li> <li>6. Terlaksananya pengumpulan data dan</li> </ol>
---	--	---	------	------	------	--	---

		Laporan Pengendalian Administrasi Pembangunan yang memenuhi standar akuntabilitas	8 Laporan	21 Laporan	100 %		informasi dalam rangka penyusunan pelaporan pelaksanaan daerah; 7. Terlaksananya Monev pelaporan pelaksanaan PD dan wilayah.
--	--	---	-----------	------------	-------	--	---

Program-program yang mendukung sasaran ini adalah Program Perekonomian dan Pembangunan dan Program Administrasi Pembangunan. Adapun kegiatan – kegiatan yang mendukung dengan permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan kedua program tersebut adalah sebagai berikut :

- **Program Perekonomian dan Pembangunan dengan kegiatan :**

- a. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian.**

No	Indikator Kinerja Utama	2023				Ket.
		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
1	1. Jumlah Dokumen hasil Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).	1 Dokumen	62 Dokumen 7 Rek	Beberapa lokasi yang menjadi tujuan monev tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran	Permintaan penambahan anggaran sehingga kegiatan tersebut bisa terlaksana	
	2. Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan sosialisasi kebijakan pengembangan UMKM dan Optimalisasi Penyaluran KUR	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Rek	Beberapa lokasi yang menjadi tujuan monev tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran	Permintaan penambahan anggaran sehingga kegiatan tersebut bisa terlaksana	
	3. Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, evaluasi dalam rangka pengendalian BBM bersubsidi di NTT	1 Dokumen	2 Dokumen			

**b. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam.**

No	Indikator Kinerja Utama	2023				Ket.
		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
2	1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi penyusunan Kebijakan Terkait pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) lok Kota Kupang dan Kab.TTS	1 Dokumen	1 Dokumen	Dari 5 kegiatan hanya dialaksanakan sebanyak 1 kali karena anggaran yang terbatas	Permintaan penambahan anggaran sehingga kegiatan tersebut bisa terlaksana	-
	2. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Madu di Kec. Mutis	1 Dokumen	1 Dokumen			Sesuai Target -
	3. Jumlah Dokumen Hasil MonItoring dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan SDA lok. Kab. Kupang, Sumba Barat Daya 1 x, Kab. TTS, Kab. TTU .	1 Dokumen	1 Dokumen	Beberapa lokasi yang menjadi tujuan monev tidak terlaksana karena Anggaran yang terbatas	Permintaan penambahan anggaran sehingga kegiatan tersebut bisa terlaksana	-
	4. Jumlah Dokumen Hasil Rapat Terpadu Upaya Peningkatan Elektrifikasi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Sesuai Target

No	Indikator Kinerja Utama	2023				Ket.
		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
	5. Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Potensi Pengembangan EBT dan Sumber Daya Alam Lok. Kab. Kupang, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Timur	1 Dokumen	1 Dokumen	Beberapa lokasi yang menjadi tujuan monev tidak terlaksana karena Anggaran yang terbatas	Permintaan penambahan anggaran sehingga kegiatan tersebut bisa terlaksana	-

**c. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**

No	Indikator Kinerja Utama	2023				Ket.
		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
3	1. Jumlah Dokumen Hasil Rapat Evaluasi Kinerja dan Pembinaan BUMD Provinsi (3 kali) Rapat Evaluasi Pembinaan BUMD Prov menghasilkan 1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	-	Sesuai Target
	2. Jumlah Dokumen Hasil	5 Lokasi	5 Lokasi 1	Beberapa lokasi yang	Permintaan penambahan	

No	Indikator Kinerja Utama	2023				Ket.
		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Lok. Kab Ende, kab .Alor, Kab .Kupang, TTU,TTS	1 Dok	Dok	menjadi tujuan monev tidak terlaksana karena Anggaran yang terbatas	anggaran sehingga kegiatan tersebut bisa terlaksana	
3.	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Pembinaan BUMD Prov NTT (PT.BPD NTT,PT.Jamkrida, PT.Flobamor, dan PT. Kawasan Industri Bolok )	1 Dok	1 Dok	-	-	Sesuai Target
4.	Jumlah SK Hasil Rapat Sosialisasi SK Gubernur Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum	1 SK Gubernur	1 SK Gubernur	-	-	Sesuai Target

No	Indikator Kinerja Utama	2023				Ket.
		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
5.	Jumlah Hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan SK Gubernur Tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Perumda /PDAM di Kab/Kota Se- Provinsi NTT (Lok. Manggarai Barat ,Ende,TTU,TTS, Belu,Alor)	6 Lokasi 1 Dokumen	6 Lokasi 1 Dokumen	Beberapa lokasi yang menjadi tujuan monev tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran	Permintaan penambahan anggaran sehingga kegiatan tersebut bisa terlaksana	
6.	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan pengelolaan BLUD.( Lok. Kab Kupang tgl 23 Mei 2023)	1 Dok	1 Dok	-	-	Sesuai Target
7.	Jumlah Dokumen Hasil Monev Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri RI Terkait Kebijakan Pendirian BLUD di Prov.NTT (7-sd	1 Dok	1 Dok			Sesuai Target

No	Indikator Kinerja Utama	2023				Ket.
		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
	Februari 2023)					
	8. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD.	1 Dok	1 Dok			Sesuai Target
	9. Jumlah Dokumen Hasil Monev Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri RI terkait kebijakan pendirian BLUD di Prov NTT ( tgl 3 sd 6 Desember 2023	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Sesuai Target

- **Program Administrasi dan Pembangunan**

No	Indikator Kinerja Utama	2023				Ket.
		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	

No	Indikator Kinerja Utama	2023				Ket.
		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
4	1. Jumlah Dokumen Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (APBD) Rapat dilaksanakan 2x dalam Setahun dengan lokasi di Kota Kupang ,Kab Kupang, Kab.Naga, Kab. Sikka, Kab. TTS, Kab.TTU	2 Dok	2 Dok	-	-	Sesuai Target
	2. Jumlah Dokumen Hasil Paket Sebaran Kegiatan APBD	1 Dok	1 Dok	-	-	Sesuai Target
	3. Jumlah Dokumen Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (APBN) Rapat dilaksanakan 2x dalam Setahun dengan lokasi di Kota Kupang, Kab Kupang,	2 Dok	2 Dok	-	-	Sesuai Target
	2 Jumlah Dokumen Hasil monitoring dan pemantauan pelaksanaan pembangunan daerah di kab./kota lokasi Kota Kupang, Kab.Kupang Kab.Nagekeo ,Kab. Sikka,	1 Dok	1 Dok			Sesuai Target

No	Indikator Kinerja Utama	2023				Ket.
		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
.	Kab. TTS, Kab.TTU					
3	Jumlah Dokumen Hasil rapat koordinasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun dengan Lok. Kota Kupang,Kab TTS	1 Dok	2 Dok	-	-	Sesuai Target

No	Indikator Kinerja Utama	2023				Ket.
		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
6.	Jumlah Dokumen Hasil pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan pelaporan pelaksanaan Pembangunan daerah dari 33 PD	13 Dok	13 Dok -	-	-	Sesuai Target
7.	Jumlah Dokumen Hasil dan evaluasi pelaporan pelaksanaan Pembangunan daerah dan wilayah	1 Dok	1 Dok			Sesuai Target

**Cakupan Kegiatan Tahun 2023 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT**  
**Yang Dilaksanakan Setiap Tahun**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Terlaksanannya koordinasi pembinaan ,Monitoring dan Evaluasi Penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian dan SDA	Perlaksanaan Kebijakan Perekonomian Makro dan Mikro	5 Rekomendasi	73 Rekomendasi
		Perlaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi
	Terlaksananya koordinasi, pembinaan monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	Persentasi Jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik	50%	75%
		Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Rekomendasi	8 Rekomendasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
	Terwujudnya Tatakelola Monitoring dan Pelaporan pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah dan Wilayah di Provinsi atau Kab/Kota	Efektivitas peningkatan kinerja Administrasi Pembangunan	100%	100%
		Laporan Pengendalian Administrasi Pembangunan yang memenuhi standar akuntabilitas	8 Rekomendasi	21 Rekomendasi

Capaian Sasaran 1 **Terlaksanannya koordinasi pembinaan ,Monitoring dan Evaluasi Penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian dan SDA** tahun 2023 mencapai 100%,

Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Makro dan Mikro Tahun 2023 adalah 100%, mencapai target yang ditetapkan. Hasil pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

**a) Ruang Lingkup**

1. Kepala Dinas Perangkat Daerah yang tergabung dalam TPID
2. Forkopinda Provinsi NTT
3. Kepala BI
4. Kepala BPS
5. Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog NTT
6. Manajer Pelindo III Pelabuhan Tenau Kupang
7. Manajer Angkasa Pura II Eltari Kupang
8. Pasar Kasih Naikoten
9. Pasar Oeba
10. Pasar Oebobo
11. Gudang Bulong
12. Gudang Distributor Komoditas Pangan
13. Masyarakat
14. Konsumen
15. Pertamina
16. Kabupaten/ Kota
17. Pemda TTS
18. Bank NTT
19. Bank BRI
20. Anggota Kelompok sentra Madu Mutis
21. Perangkat Daerah Provinsi Undana
22. Anggota Pokja HHBK Provinsi NTT

**b) Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk:

1. Terlaksananya HLM TPID, 4 kali, untuk 30 orang, Lokasi Kota Kupang,
2. RATEK TPID, 2 kali, untuk 30 Orang Lokasi Kota Kupang
3. Sidak Pasar, 2 kali, untuk 30 orang Lokasi Kota Kupang
4. Terlaksananya Rapat Optimalisasi Penyaluran KUR dan UMI, 1 kali, untuk 60 orang, Lokasi Kota Kupang
5. Forum Grup Diskusi (FGD), 4 kali, untuk 30 org, Lokasi Kota Kupang,
6. Rapat Evaluasi Pengendalian Distribusi BBM, 1 kali, untuk 60 orang, Lokasi Kota Kupang

7. Terlaksananya pembinaan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Madu di Kec. Mutis;
8. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan SDA ( lokasi Kab. Kupang, Sumba Barat Daya 1x, Kab. TTS, Kab. TTU ;
9. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi potensi pengembangan EBT dan SDA (lokasi Kab. Kupang, Sumba Tengah, Sumba Timur).

**1**

**c) Hasil yang dicapai**

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Makro dan Mikro Menghasilkan 73 Rekomendasi

**d) Faktor Pendukung dan Penghambat**

**1. Faktor Pendukung**

1. Adanya Koordinasi yang baik dari lintas Sektor dan Dinas Teknis dalam mendukung kegiatan Makro ,Mikro dan SDA
2. Adanya sumber daya yang mendukung pelaksanaan Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan ( Makro, Mikro ,SDA );
3. Pelaksanaan kegiatan Perekonomian dan Pembangunan didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD.

**2. Faktor Penghambat**

1. Kecenderungan Perangkat daerah lambat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang diminta
2. Terdapat beberapa kesepakatan bersama yang belum ada tindak lanjutnya.

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Terlaksananya koordinasi pembinaan ,Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Perlaksanaan Kebijakan Perekonomian Makro dan Mikro	5 Rekomendasi	73 Rekomendasi

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian dan SDA	Perlaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi

Capaian Perlaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam **Tahun 2023** adalah 100%, mencapai target yang ditetapkan. Hasil pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Ruang Lingkup
  1. Pemda TTS
  2. Anggota Kelompok sentra Madu Mutis
  3. Perangkat Daerah Provinsi Undana
  4. Anggota Pokja HHBK Provinsi NTT
- b. Pelaksanaan Kegiatan
  1. Terlaksananya pembinaan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Madu di Kec. Mutis;
  2. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan SDA ( lokasi Kab. Kupang, Sumba Barat Daya 1x, Kab. TTS, Kab. TTU ;
  3. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi potensi pengembangan EBT dan SDA (lokasi Kab. Kupang, Sumba Tengah, Sumba Timur).
- C. Hasil yang dicapai

Perlaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam menghasilkan 4 Rekomendasi
- d. Faktor Pendukung dan Penghambat
  1. Faktor pendukung

1. Adanya Koordinasi yang baik dari lintas Sektor dan Dinas Teknis dalam mendukung kegiatan Makro ,Mikro dan SDA
2. Adanya sumber daya yang mendukung pelaksanaan Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan ( Makro, Mikro ,SDA );
3. Pelaksanaan kegiatan Perekonomian dan Pembangunan didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD.

2. Faktor Penghambat

1. Kecenderungan Perangkat daerah lambat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang diminta
2. Terdapat beberapa kesepakatan bersama yang belum ada tindak lanjutnya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
	Terlaksananya koordinasi, pembinaan monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	Persentasi Jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik	50%	75%
		Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Rekomendasi	8 Rekomendasi

Capaian Persentase jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik dan kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD **Tahun 2023** adalah 100%, mencapai target yang ditetapkan. Hasil pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup

1. Direktur Utama PT. JAMKRIDA
2. Direktur Utama PT Flobamor
3. Direktur Utama PT Kawasan Industri Bolok
4. Direktur Utama PT BPD NTT ( Bank NTT )Direktur Eksekutif PERPAMSI Pusat
5. Pakar Ekonomi Politeknik Negeri Kupang

6. Walikota Kupang
7. Kadis Kesehatan, Kependudukan dan pencatatan Sipil Provinsi NTT
8. Direktur BLUD RSUD Prof Dr. W.Z Johannes Kupang provinsi NTT
9. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT
10. Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT
11. Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi NTT
12. Kepala BLUD SPAM Provinsi NTT
13. Direktur BLUD RSJ Naimata Kupang

**b. Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk:

1. Terlaksananya Rapat Evaluasi Kinerja dan Pembinaan BUMD Provinsi (3x Rapat Evaluasi Pembinaan BUMD Provinsi);
2. Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Lok Kab Ende, Kab Alor, Kab.Kupang Kab.TTS, Kab.TTU;
3. Terlaksananya pemantauan dan Pembinaan BUMD Provinsi NTT ( PT. BPD NTT, PT. Jamkrida, PT.Flobamor, dan PT. Kawasan Industri Bolok );
4. Terlaksananya Rapat sosialisasi SK Gubernur Penetapan Tarif Batas Atas dan Bawah Air Minum;
5. Terlaksananya monitoring dan evaluasi penetapan SK Gubernur Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Perumda/PDAM di Kab/Kota Se-Provinsi NTT (Lok. Manggarai Barat, Ende, TTS, TTU, Belu, Alor);
6. Terlaksananya Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring,dan Evaluasi kebijakan Pengelolaan BLUD (Lokasi, Kab. Kupang Tanggal 23 Mei 2023);
7. Monev dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Kementerian dalam Negeri RI Terkait kebijakan Pengelolaan BLUD di Prov. NTT tanggal 7 s/d 9 Februari 2023;
8. Terlaksananya koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi kebijakan Pendirian BLUD;
9. Monev dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Kementerian dalam Negeri RI Terkait kebijakan Pendirian BLUD di Prov. NTT tanggal 3 s/d 6

**C. Hasil Yang Dicapai**

kegiatan BUMD dan BLUD yang berkinerja baik sesuai dengan Laporan Akuntabilitas keuangan menghasilkan 3 BUMD yang berkinerja Baik dan kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD Menghasilkan 8 Dokumen dan 1 SK Gubernur Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Perumda/PDAM di Kab/Kota Se-Provinsi NTT

**c. Faktor Pendukung dan Penghambat**

1. Faktor Pendukung

- a. Adanya sumber daya yang mendukung pelaksanaan Kegiatan BUMD menjadikan BUMD yang berkinerja Baik
- b. Pelaksanaan kegiatan Perekonomian dan Pembangunan didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD.

2. Faktor Penghambat

- a. Kurang Efektif dan Efesien dalam pembinaan dan Manajemen pengelolaan BUMD
- b. Belum adanya tenaga professional dalam menganalisis Laporan keuangan dari BUMD
- c. Terdapat beberapa kesepakatan bersama yang belum ada tindak lanjutnya.

<b>N O.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Terwujudnya Tatakelolah Monitoring dan Pelaporan pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah dan Wilayah di Provinsi atau Kab/Kota	Efektivitas peningkatan kinerja Administrasi Pembangunan	100%	100%
		Laporan Pengendalian Administrasi Pembangunan yang memenuhi standar	8 Rekomendasi	21 Rekomenda

<b>N O.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		akuntabilitas		si

Capaian Cakupan Koordinasi monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah yang tertib Tahun 2023 adalah 100%, mencapai target yang ditetapkan. Hasil pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. Ruang Lingkup**

1. Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT
2. UPT Pusat , Balai -Balai Kementerian yang ada di Provinsi NTT
3. Pemerintah Kabupaten Kota Se -NTT

**b. Pelaksanaan Kegiatan**

Dapat diuraikan sebagai berikut :

5. Terlaksananya rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan (APBD);
6. Paket sebaran kegiatan APBD;
7. Terlaksananya rapat evauasi pelaksanaan pembangunan (APBN);Rapat dilaksanakan 2 x dalam setahun lokasi di kota Kupang dan Kab Kupang
8. Terlaksananya monitoring dan pemantauan pelaksanaan pembangunan daerah di Kab/Kota; ( Lokasi Kota Kupang ,Kab. Kupang Kab. Ngada ,kab Sikka, Kab TTs,Kab TTU
9. Terlaksananya rapat koordinasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah; yang dilaksanakan 2 Kali dalam setahun dengan Lokasi Kota Kupang, Kab. TTS
10. Terlaksananya pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan pelaporan pelaksanaan daerah;
11. Terlaksananya Monev pelaporan pelaksanaan PD dan wilayah.

- C. Capaian Cakupan Koordinasi monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah yang tertib Tahun 2023 menghasilkan 21 Dokumen

**d. Faktor Pendukung dan Penghambat**

1. Faktor Pendukung

- a. Adanya Koordinasi yang baik dari 33 OPD dalam mendukung kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Administrasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah
- b. Adanya sumber daya yang mendukung pelaksanaan Kegiatan monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah;
- c. Pelaksanaan kegiatan Perekonomian dan Pembangunan didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD.

2. Faktor Penghambat

- a. Kecenderungan Perangkat daerah lambat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan terkait lapaoran Administrasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah yang diminta

**3.3 Akuntabilitas Keuangan**

Komposisi anggaran yang dialokasikan dalam DPA-DPPA Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan dan Alokasi anggaran pada setiap kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

NO/ KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			RP	%	RP	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	<b>BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>1.116.684.280.-</b>	<b>867.758.530.-</b>	<b>77,71</b>	<b>248.925.750</b>	<b>22,29</b>
<b>01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG</b>	<b>441.685.840.-</b>	<b>396.645.500</b>	<b>89,80</b>	<b>45.040.340</b>	<b>10,19</b>

NO/ KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			RP	%	RP	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	<b>URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>					
<b>01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>47.616.400</b>	<b>14.801.400</b>	<b>31,08</b>	<b>32.815.000</b>	<b>68,92</b>
<b>01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>207.090.600</b>	<b>198.970.880</b>	<b>96,08</b>	<b>8.119.720</b>	<b>3,92</b>
<b>01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>37.278.000</b>	<b>36.977.430</b>	<b>99,19</b>	<b>300.570</b>	<b>0,81</b>
<b>01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>96.648.040</b>	<b>93.575.740</b>	<b>96,82</b>	<b>3.072.300</b>	<b>3,18</b>
<b>01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>53.052.800</b>	<b>52.520.050</b>	<b>98,99</b>	<b>532.750</b>	<b>1,01</b>
<b>06.</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>574.998.700</b>	<b>386.338.490</b>	<b>67,18</b>	<b>188.660.210</b>	<b>32,82</b>
<b>06.1.01.1</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</b>	<b>324.999.900</b>	<b>204.002.300</b>	<b>62,76</b>	<b>121.997.600</b>	<b>37,23</b>
<b>06.1.01.1.0</b>	<b>Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi</b>	<b>324.999.900</b>	<b>204.002.300</b>	<b>62,76</b>	<b>121.997.600</b>	<b>37,23</b>

NO/ KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			RP	%	RP	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>1</b>	Makro					
<b>06.1.02</b>	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	<b>74.999.720</b>	<b>46.157.800</b>	<b>61,54</b>	<b>28.841.920</b>	<b>38,46</b>
<b>06.1.02.01</b>	Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	53.232.100	34.371.500	64,56	18.360.600	34,49
<b>06.1.02.03</b>	Koordinasi, Sinkronisasi, dan evaluasi Kebijakan Energi dan Air	21.767.620	<b>11.286.300</b>	51,85	<b>10.481.320</b>	48,15
<b>06.1.03</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</b>	<b>174.999.080</b>	136.228.390	<b>77,85</b>	33.770.690	<b>22,15</b>
<b>06.1.03.01</b>	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	33.819.660	20.614.500	60,95	13.205.160	39,04
<b>06.1.03.02</b>	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	66.179.620	45.556.150	68,83	20.723.470	31,31

NO/ KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			RP	%	RP	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	Air Minum, Limbah dan Sanitasi					
<b>06.1.03.04</b>	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.	50.000.000	45.917.440	91,83	4.082.560	8,16
<b>06.1.03.05</b>	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	24.999.800	24.240.300	96,96	759.500	3,03
<b>08</b>	<b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>99.999.740</b>	<b>84.724.600</b>	<b>84,72</b>	<b>15.275.140</b>	<b>15,28</b>
<b>08.1.01</b>	<b>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>69.999.740</b>	<b>58.838.700</b>	<b>84,06</b>	<b>11.161.040</b>	<b>15,94</b>
<b>08.1.01</b>	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	33.499.840	31.764.100	94,81	1.735.740	5,19
<b>08.1.02</b>	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan	6.499.900	5.999.700	92,30	500.200	7,70

NO/ KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			RP	%	RP	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	Pembangunan APBN					
<b>08.1.02</b>	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	30.000.000	21.074.900	70,24	8.925.100	29,76
<b>08.1.02</b>	<b>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>30.000.000</b>	<b>25.885.900</b>	<b>86,29</b>	<b>4.114.100</b>	<b>13,71</b>
<b>08.1.02.02</b>	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	30.000.000	<b>25.885.900</b>	<b>86,29</b>	<b>4.114.100</b>	<b>13,71</b>

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan evaluasi sekaligus pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

#### 4.1. Kesimpulan

Dari hasil evaluasi kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) sasaran Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dengan jumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan capaian kerjanya dikategorikan berhasil baik. Dapat dijelaskan bahwa target yang di berikan dalam RPJMD 2018-2023 dapat di capai sesuai dengan laporan pada Bab 3 (tiga).

Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Anggaran yang dialokasikan untuk Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT mendapat alokasi dana untuk Tahun 2023 sebesar **Rp 1.116.684.280** dan sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar **Rp. 867.758.530,-** atau **77,71%**.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa kendala / masalah yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Akibat pencairan dana yang terbatas sehingga beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.
2. Berdasarkan analisis jabatan jumlah pegawai di Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT sebanyak 39 orang. Jumlah pegawai tersebut masih kurang baik dari sisi kualitas maupun kuantitas khususnya dalam jabatan fungsional umum.
3. Pengumpulan data base terkait program dan kegiatan yang telah dilaksanakan masih belum terdokumentasi dengan baik.

#### 4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Tahun 2023 maka untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja tahun 2024 disesuaikan berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026.
2. Perlu penambahan jabatan fungsional umum sehingga dapat membantu memperlancar tugas pokok dan fungsi di Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT.
3. Data base dari setiap kegiatan akan di dokumentasikan dengan baik.
4. Capaian hasil secara administratif berupa tersusunnya sejumlah dokumen kebijakan perlu dilengkapi dengan capaian dari pelaksanaan kebijakan ekonomi, pengelolaan SDA, Kinerja BUMD dan BLUD serta AKIP

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan tahun 2023 dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Kupang, 26 Februari 2024

Plt. Kepala Biro Perekonomian dan  
Administrasi Pembangunan  
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,



*(Handwritten signature)*  
Drs. Alexander B. Koroh, MPM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 197004271990031005